



► **GANGGUAN KAMTIBMAS**

Miras Harus Jadi Perhatian Bersama

DANUREJAN-Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama sejumlah organisasi lainnya menggelar aksi unjuk rasa di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Jumat (25/10).

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com



Harian Jogja/Yosef Leon Pinsker

Sejumlah anggota FUI DIY saat berunjuk rasa meminta penertiban peredaran miras di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Jumat (25/10).

Dalam tuntutanannya, mereka meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap maraknya peredaran minuman keras (miras) di Bumi Mataram.

Ketua AM FUI DIY, Fadlun Amin, mengungkapkan jajarannya telah mengirimkan surat kepada Gubernur DIY untuk audiensi. "Kami berharap Gubernur dapat menerima perwakilan kami dan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," ujar Fadlun, Jumat.

Perwakilan FUI DIY lainnya, Ustad Umar, menyoroti dampak negatif peredaran miras terhadap generasi muda, seperti kasus penikaman yang menimpa santri sebuah pondok pesantren di Krapyak, Sewon, Bantul, beberapa waktu lalu.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, menyatakan jajarannya akan menjadwalkan audiensi dengan perwakilan FUI. "Kami memahami keprihatinan masyarakat terkait dengan peredaran miras. Gubernur

► **FUI DIY meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap maraknya peredaran miras di Bumi Mataram.**

► **Sistem OSS yang dirancang untuk mempermudah perizinan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hukum.**

akan menyediakan waktu untuk mendengarkan aspirasi mereka," kata Saktiyana.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengungkapkan jajarannya terus menggelar razia penertiban sejumlah tempat yang menjual miras. Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut masih belum optimal. "Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran miras," katanya.

Proses Perizinan

Sebelumnya, Pemda DIY menegaskan pentingnya klarifikasi kewenangan dalam proses pengawasan perizinan,

khususnya yang melibatkan teknologi informasi. Hal ini disampaikan menyusul maraknya aktivitas bisnis minuman keras (miras) *online* yang sulit dipantau dan dikendalikan.

Sekda DIY, Beny Suharsono, mengaku jajarannya telah mengumpulkan data terkait dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perizinan miras, tiga pekan lalu. Tujuannya untuk memastikan setiap pihak memahami tanggung jawab, hak, dan kewajiban mereka dalam proses tersebut. "Semua harus tahu kewenangannya, kewajibannya, dan haknya. Supaya orang tidak asal lempar tanggung jawab," kata

Beny, Rabu (23/10).

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah cepatnya perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam proses perizinan. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar hukum.

Guna mengatasi permasalahan ini, Beny mengusulkan agar kewenangan pengawasan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, kecuali untuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Beny juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan dalam proses pengawasan perizinan. Menurutnya, meskipun OSS mempercepat proses perizinan, tapi tetap perlu pengecekan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005